

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) PERANGKAT DAERAH UNTUK RENJA TAHUN 2024

NAMA OPD	: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Unit Kerja	: Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
Bidang	: Teknologi Informatika
Program	: Program Aplikasi Informatika
Indikator Program	: Persentase Pemanfaatan Aplikasi Informatika
Kegiatan	: Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kegiatan	: Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan SPBE
Subkegiatan	: Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE
Indikator Subkegiatan	: Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City

I. LATAR BELAKANG

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada pengguna SPBE. Salah satu tujuan SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel. Dalam tata kelola SPBE ada kerangka kerja yang akan memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

Dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE disebutkan bahwa salah satu unsur SPBE tersebut adalah arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.

Dalam sub kegiatan ini akan melaksanakan kegiatan pembuatan dokumen domain arsitektur SPBE dan monitoring evaluasi SPBE.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari sub kegiatan:

Mempercepat tata kelola SPBE dan menjadi alat untuk menunjang pengambilan keputusan serta penyusunan kebijakan oleh pimpinan baik untuk tata kelola maupun manajemen pengelola teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kegiatan Arsitektur SPBE berdampak positif bagi masyarakat serta

pemerintah, dimana untuk pemerintah memberikan kemudahan operasional, penyederhanaan struktur, dan penghematan anggaran. Sementara, dampak bagi masyarakat adalah memiliki pemerintahan yang kredibel dan terpercaya, peningkatan kualitas hidup, serta layanan yang semakin baik.

Tujuan dari sub kegiatan:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta meningkatkan efisiensi keterpaduan penyelenggaraan SPBE
2. Mengurangi tumpang tindih fungsi bisnis pemerintahan mengurangi duplikasi infrastruktur dan sistem informasi
3. Menerapkan standarisasi TIK
4. Berbagi data dan informasi
5. Memudahkan integrasi layanan SPBE
6. Meningkatkan efisiensi biaya SPBE

III. DASAR HUKUM

- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Magelang

IV. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerjasama dengan pihak lain. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut.

No	Nama Paket Belanja	Jenis Belanja	Jenis Pengadaan	Tahapan
1	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor : <ul style="list-style-type: none"> • ATK • Kertas dan cover • Benda pos • Bahan Komputer 	Belanja Barang	Pengadaan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan penyedia - Pelaksanaan kegiatan - Serah terima hasil pekerjaan
2	Belanja Makanan dan minuman rapat	Belanja Barang	Pengadaan Langsung	
3	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	Belanja Jasa	Pengadaan Langsung	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan penyedia - Pelaksanaan kegiatan - Serah terima hasil pekerjaan

V. KELUARAN

No	Aktivitas	Keluaran
----	-----------	----------

1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPBE	2 laporan pelaksanaan SPBE
2	Melaksanakan pendampingan monitoring dan evaluasi SPBE	1 Dokumen penilaian internal SPBE beserta data dukungannya

VI. PENGGUNAAN STANDARISASI, HSPK DAN ASB

No	Nama Paket Belanja	Nama Barang	Rekening belanja	Jenis standarisasi	Standarisasi
1	Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor	ATK, Kertas dan Cover, Bahan Komputer, Benda pos	Belanja Barang	SSH	Sudah ada standarisasi
2	Belanja Makanan dan minuman rapat	Makanan dan minuman rapat	Belanja Barang	SSH	Sudah ada standarisasi
3	Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika – Jasa Konsultasi Pendampingan Monitoring dan Evaluasi SPBE	Dokumen penilaian internal SPBE beserta data dukungannya	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Telematika	SBU	Belum ada standarisasi (sudah diajukan standarisasi 2024)

VII. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Sub Kegiatan ini dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Bidang Teknologi Informatika

VIII. PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN

- Pelaksana Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Bidang Teknologi Informatika
- Penanggungjawab Kegiatan/subkegiatan
 - Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
- Penerima Manfaat
 - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
 - Pemerintah Kota Magelang

IX. JADWAL KEGIATAN/SUBKEGIATAN

No	Aktivitas	Waktu Kegiatan	
		Mulai Kegiatan	Akhir Kegiatan

1	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan SPBE	1 Januari 2024	31 Desember 2024
2	Jasa Konsultasi Pendampingan Monitoring dan Evaluasi SPBE	1 Februari 2024	30 April 2024

X. BIAYA

Sumber pembiayaan diambil dari APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2023 pada pembiayaan Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik sebesar Rp. 170.668.500,00 (Seratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus rupiah).

XI. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan sub kegiatan tersebut.

Pejabat yang bertanggung pada kegiatan yang akan dilaksanakan (PPTK)

RONGGO RADITYO NIMOKO,S.Kom,M.Eng

Pembina

NIP. 19771120 200501 1 010